

FILIPINA

SEBUAH IKHTIAR DI TAPAL BATAS

PNPM MANDIRI BERUSAHA MEMBEBASAKAN WILAYAH-WILAYAH PERBATASAN DARI BELITAN KEMISKINAN. NUR FARIDA AHNIAR MENULISKAN HASIL REPORTASENYA DARI SANGIHE, SULAWESI UTARA, YANG BERBATASAN DENGAN FILIPINA.

LAUT PASIFIK

Medan Ekstrem Marore

Kecamatan Marore di Kabupaten Sangihe termasuk salah satu areal tersulit lokasi PNPM Perdesaan. Seorang kader desa bahkan hampir kehilangan nyawa, saat menyusuri laut dengan perahu kecil dari Matutuang menuju Marore, pulau terdepan yang berbatasan dengan Filipina.



Pulau Marore



KECAMATAN MARORE

Dana PNPM Perdesaan (2013):

Rp **1,85** miliar

Pulau Matutuang

Hadir sejak 4 tahun lalu, terbangun:

980 meter jalan

18 kamar mandi umum (MCK)

420 meter tanggul penahan ombak

LAUT SULAWESI

KABUPATEN SANGIHE:

Luas wilayah: **1.013km²**

127.520 jiwa (2011)

38,9%

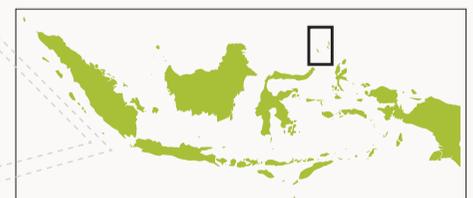
penduduk miskin (2010)

Dana PNPM Perdesaan (2013):

Rp **14,6** miliar → **12** kecamatan

TAHUNA

Sebanyak enam edisi, mulai Juni 2013, KATADATA akan mengulas tentang jejak 15 tahun PNPM Mandiri Perdesaan. Artikel ditayangkan setiappekan ketiga di majalah *Tempo* dan selengkapnya di situs www.katadata.co.id. Kritik dan saran ke info@katadata.co.id





Dok. KATADATA/Agung Samosir

RECKSAN Salur bisa merasakan enak dan susahny tinggal di wilayah perbatasan dua negara: Indonesia dan Filipina. Di Filipina, kampung halaman kakeknya, ia menghabiskan masa kecil hingga lulus SD. Di Indonesia, tempat asal ayahnya, ia tinggal sejak mulai duduk di bangku SMP. Pengalaman hidup di negara lain bisa menjadi kebanggaan. Tapi tidak bagi Recksan. Seperti ayahnya, ia tinggal di Pulau Matutuang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi

Utara. Di wilayah itu, banyak orang berdarah campuran. Bahkan sebagian warga lebih fasih berbahasa Tagalog, bahasa nasional Filipina, dibanding Bahasa Indonesia.

Sangihe bukan daerah perbatasan yang makmur. Tapi, Recksan bisa merasakan bahwa kehidupan di wilayah Indonesia lebih menyenangkan. "Untuk masalah lapangan kerja, di Matutuang lebih banyak," kata lelaki 27 tahun ini. "Jika di Filipina, harus bekerja sekuat tenaga, tak ada subsidi (pemerintah).



Dok. KATADATA/Agung Samosir

Harus bekerja sendiri.”

Daerah perbatasan seperti Sangihe memang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sejumlah program pembangunan digelar di sana, termasuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, kegiatan tempat Reckson bekerja sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berbeda dengan kegiatan pembangunan lainnya, PNPM mengambil pola kegiatan berdasarkan usulan dari masyarakat sendiri, dan mereka pula yang mengerjakan, atau disebut community driven development. Dirintis dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada 1998 sebagai kegiatan kerja sama dengan Bank Dunia, PNPM terus membesar.

Dalam kurun 15 tahun, PNPM Perdesaan telah menjangkau 63 ribu desa di seluruh Indonesia. Total dana yang dikucurkan pemerintah dan Bank Dunia mencapai Rp 70 triliun. Setiap kecamatan mendapat dana Rp 300 juta-4 miliar per tahun. Jeremia Pilsrun Antara, pendamping lokal PNPM di wilayah Tabukan Tengah, Sangihe, menyebut kecamatan tempatnya bertanggung jawab mendapat Rp 4 miliar pada 2010-2012.



“Dalam kurun 15 tahun, PNPM Perdesaan telah menjangkau 63000 desa di seluruh Indonesia.”

Dalam pembangunan model PNPM, masyarakat desa mengusulkan program apa yang akan digelar di wilayah mereka. Setiap desa membawa proposalnya untuk berkompetisi dengan desa-desa lain. Berbeda dengan proyek lain, pembangunan fisik infrastruktur tidak boleh menggunakan kontraktor, harus dilakukan warga sendiri. Para pekerja juga harus dari warga setempat.

Hal ini, selain membuat biaya menjadi jauh lebih murah, “Partisipasi masyarakat menjadi tinggi,” kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, kepada tim Katadata. Ia memberi contoh bagaimana PNPM membangun pipa dan bak penampungan air minum yang lahannya didapat gratis dari warga.

Ini berbeda dengan program pembangunan lain yang diputuskan oleh pusat. “Ketika semua itu menjadi proyek pemerintah semata, semua meminta ganti rugi sekecil apa pun,” katanya.

Di desa Bowongkali, Tabukan Tengah, Sangihe, misalnya, warga mengusulkan pembangunan jalan sekitar 700 meter. “Warga swadaya

menyumbangkan tenaga dan menyumbang 25 kubik batu," kata Jeremia. "Masyarakat yang dulunya pengangguran, dilibatkan

sebagai tukang sehingga mendapat penghasilan."

Di wilayah-wilayah terdepan Indonesia, pemerintah mengembangkan lebih jauh PNPM Perdesaan untuk mempercepat upaya pemberantasan kemiskinan. Sejumlah daerah perbatasan mendapat dana lebih sejak 2010. Pada tahun itu, misalnya, tiga kabupaten perbatasan di Sulawesi Utara mendapat alokasi Rp 41 miliar untuk dana PNPM. Selain Sangihe, dua lainnya adalah Talaud dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Hasilnya, di Kabupaten Sangihe, sejak 2010, program

PNPM Mandiri Perdesaan telah membangun 47 kilometer jalan, dan 18 kilometer di antaranya dari program PNPM Mandiri Perdesaan di



Dok. KATADATA/Agung Samosir



“Kecamatan Tabukan Tengah menjadi daerah pertama di Sangihe yang memiliki bangunan pengolahan sagu.”

Perbatasan.

Di Tabukan Tengah, selain program “konvensional” seperti pembuatan fasilitas air bersih dan jalan, atau pemberian dana pinjaman lewat dana bergulir, PNPM juga membuat unit pengolah sagu. Tanaman sagu—yang di Jawa sering menjadi campuran krupuk atau makanan lain—menjadi salah satu sumber penghasilan warga Pulau Sangihe selain kelapa dan cengkih.

Untuk mengolah sagu, dahulu warga harus mencacah dengan cangkul, yang memakan waktu sangat lama dan melelahkan. Butuh dua hari. Tapi, dengan membuat mesin pencacah buatan sendiri—dimodifikasi dari mesin kapal—sekarang mereka cuma membutuhkan waktu beberapa menit. “Kecamatan Tabukan Tengah menjadi daerah pertama di Sangihe yang memiliki bangunan pengolahan sagu,” kata Jeremia.

“Kecamatan Tabukan Tengah menjadi daerah pertama di Sangihe yang memiliki bangunan pengolahan sagu,” kata Jeremia, yang baru saja diganjar penghargaan sebagai pendamping lokal terbaik dari Kementerian Dalam Negeri.

Di Matutuang, sejak kehadiran PNPM empat tahun lalu, sudah berhasil dibangun 980 meter—dari 1.100 meter—jalan yang direncanakan. Selain itu, telah dibangun pula 18 kamar mandi umum (MCK) dan tanggul penahan ombak sepanjang 420 meter. Dengan gaji yang hanya Rp 200 ribu per bulan—bahkan kerap tak lancar pembayarannya—dedikasi Recksan selaku kader desa tak pernah surut. **D**



BERANDA DAVAO DEL SUR

PENGARUH FILIPINA SANGAT KUAT DI KAWASAN
PULAU-PULAU PERBATASAN DI KABUPATEN SANGIHE.
PARA KADER PENGGERAK PNPM KERAP KEREPOKAN.



PERAHU kecil itu menjadi moda transportasi andalan warga Matutuang, Marore, dan pulau-pulau lain di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Dua cadiknya menjadi senjata andalan melawan ganasnya ombak di kawasan itu. Perahu itu melaju ditenagai mesin kecil berbahan bakar bensin atau solar.

Di banyak wilayah Indonesia, moda semacam ini biasa disebut perahu tempel atau kadang kapal klotok karena suara berisik mesin yang berbunyi klotok-klotok itu. Tapi, Kabupaten Sangihe, yang memiliki 105 pulau di wilayahnya, memiliki sebutan sendiri untuk alat transportasi ini. Mereka menyebutnya sebagai pumpboat, mengikuti lidah orang Filipina untuk menyebut

perahu bercadik yang ditempli mesin.

Kabupaten Sangihe terletak di antara ujung Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Davao del Sur, Filipina. Akibatnya, pengaruh negara tetangga itu tidak bisa dilepaskan. Kabupaten ini hanya berpenduduk kurang dari 150 ribu jiwa. Mereka tersebar di 26 dari 105 pulau di wilayah di ujung utara ini.

Selama ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, mereka terbiasa hidup bersama. Dulunya Matutuang hanya pulau kosong untuk singgah. Pulau itu baru menjadi dusun sekitar 1989-an, dan baru menjadi desa pada 2008.

Sebagian penduduk memiliki rumah di Matutuang sekaligus di wilayah Filipina. Bahkan, menurut Recksan Salur, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) desa Matutuang, "Rata-rata WNI (di sini) dilahirkan di Filipina."

Karena itu, soal bahasa pun mereka masih terbawa. "Kalau sehari-hari, kebanyakan bahasa Filipina," kata Recksan, warga Sangihe yang memiliki ibu berdarah campuran Indonesia-Filipina.

Di wilayah itu, banyak warga yang tidak memahami Bahasa Indonesia. Hal ini kadang membuat para kader penggerak PNPM sedikit kerepotan.

Pulau-pulau di Sangihe dan wilayah perbatasan itu pun berpenduduk sangat sedikit. Di Kecamatan Kepulauan Marore, misalnya, ada 13 pulau dan delapan diantaranya tidak berpenghuni. Penghuni tiga pulau, yaitu Kawio, Marore, dan

Banyak warga tidak memahami Bahasa Indonesia. Hal ini membuat para kader penggerak PNPM sedikit kerepotan.

Matutuang pun total hanya 1.400-an jiwa. Untuk sampai ke Tahuna, ibu kota Kabupaten Sangihe, warga mesti menggunakan perahu selama enam jam.

Di ujung wilayah Indonesia itu, pulau-pulau perbatasan juga mendapat kesulitan infrastruktur lain seperti listrik. Tiga tahun lalu, atas usulan warga, Pulau Matutuang dan Kawio mendapat generator listrik sebagai bagian program PNPM. Generator berkapasitas 22.500 Volt Ampere (Watt) itu digunakan menerangi sekitar 100 rumah selama lima jam mulai pukul 18.00 WITA.

“Jika air laut sedang bergolak, warga terpaksa bergelap-gelapan karena tidak bisa membeli solar untuk bahan bakar.”

Persoalan kemudian muncul. Kapasitas generator yang hanya 22.500 Watt itu terlalu kecil untuk 100 rumah. Jika satu rumah mendapat jatah 450 Watt saja, dibutuhkan kapasitas generator 45 kilo Volt Ampere. Tidak mengherankan, belakangan mesin rusak. Saat ini warga sedang mengusulkan program agar membeli mesin lebih besar, berkapasitas 40 ribu Volt Ampere.

Di luar itu, listrik juga dihambat oleh cuaca buruk. Jika air laut sedang bergolak, warga terpaksa bergelap-gelapan kembali karena mereka tidak bisa membeli solar untuk bahan bakar.

Wilayah yang terpencil itu membuat kehidupan warga sangat tergantung pada cuaca dan ekonomi menjadi tidak efisien, sangat mahal. Untuk menyewa pumpboat dari ibu kota kecamatan di Pulau Marore ke Pulau Matutuang, biayanya Rp 800 ribu-1 juta. Sebagai perbandingan, dengan uang sebanyak ini, orang Manado bisa membeli tiket promo pesawat ke Jakarta.



“Untuk menghadapi ganasnya topan di perbatasan, PNPM Mandiri Perdesaan membangun talud, tembok penahan ombak.”

Ada alternatif transportasi yang lebih murah: kapal perintis. Dari ibu kota Kabupaten Sangihe, Tahuna, ke Marore hanya Rp 45 ribu. Sedangkan dari Marore ke Matutuang cukup Rp 7.500. Tapi transportasi murah ini hanya ada dua minggu sekali.

Kapal perintis ini juga membawa bahan makanan ke pulau-pulau kecil itu. “Dulu ketika belum ada kapal perintis, ketika nelayan tak bisa melaut, kami hanya bisa makan kelapa muda,” katanya. “Di sana tak ada buah-buahan, hanya kelapa saja karena kontur tanah tak subur.”

Meski kehidupan cukup berat di pulau-pulau perbatasan itu, Recksan mengatakan bekerja di wilayah ini lebih mudah dibanding tinggal di Filipina. “Penduduk sedikit, masih bisa menjadi nelayan,” kata Recksan, yang sampai lulus sekolah dasar tinggal di kampung ibunya yang masuk wilayah Filipina. “Jika di Filipina, harus bekerja sekuat tenaga, tak ada subsidi (pemerintah).”

Di Kecamatan Kepulauan Marore, karakter cuaca Filipina yang terletak di bibir Samudera Pasifik juga mempengaruhi mereka. Seperti Filipina, mereka kadang ikut tersentuh badai tropis. Saat wilayah selatan Filipina dihantam Topan Bopha pada Februari silam, misalnya, tiga rumah di Pulau Kawio ikut rusak.

Untuk menghadapi ganasnya topan di perbatasan itu, PNPM Mandiri Perdesaan, pada 2009, membangun talud, tembok penahan ombak, sepanjang ratusan meter di sejumlah pulau di Kepulauan Marore. Di Pulau Matutuang saja dibangun talud pantai sepanjang 420 meter.



DARI BANJIR SAMPAI DIKEJAR ORANG

FASILITATOR MERUPAKAN SALAH SATU ELEMEN PENTING PENGGERAK PNPM PERDESAAN. MEREKA MESTI SIAP BEKERJA DI TEMPAT TERPENCIL.

GELAP malam sudah turun. Jawahir terpaksa menghentikan sepeda motornya di pinggir sungai selebar 30 meter itu di pedalaman Kabupaten Gorontalo Utara. Air sungai sedang tinggi. Ia sendirian, padahal butuh dua orang agar bisa menyeberangkan sepeda motornya. Perjalanan masih lebih dari 20 kilometer, melewati jalan berbatu yang kemiringannya kadang 45 derajat.

Ia hanya bisa menunggu. Dan berdoa.

Berjam-jam ia menunggu. Sampai akhirnya, sekitar pukul 11 malam, ada orang lain bersepeda motor yang juga ingin menyeberang sungai itu. “Kami pun bergantian menyeberangkan motor,” katanya.

Jawahir bekerja sebagai fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Tolinggula. Tugas ini yang membuatnya malam-malam menyusuri jalanan yang sepi sendirian di pedalaman itu.

Dalam kegiatan PNPM, fasilitator memang menjadi salah satu organ paling penting. Karena masyarakat mesti mengorganisasi sendiri untuk proyek-proyeknya—PNPM memang mensyaratkan bantuannya dikelola langsung masyarakat, tidak melewati struktur pemerintahan—maka para fasilitator ini membantu proses organisasi itu. Mereka akan membantu dan mendorong warga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, memilih ketua dan perangkat lain.

Sebagai fasilitator tingkat kecamatan, Jawahir berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang berada di bawah camat. Jika ada masalah, mestinya fasilitator hanya berhubungan dengan PJOK. Dan PJOK yang akan menyampaikan ke camat. “Tapi karena kecamatannya masih baru setelah pemekaran, seringnya kami rapat bertiga (fasilitator, PJOK, dan camat),” katanya.

Saat ini, Jawahir sudah menjadi fasilitator tingkat kabupaten. Tugasnya lebih banyak

la hanya bisa menunggu dan berdoa. Berjam-jam. Sampai akhirnya sekitar pukul 11 malam ada orang lain bersepeda motor yang juga ingin menyeberang ke sungai itu.

memberi supervisi atau penambahan kemampuan fasilitator kecamatan. Secara struktural, di atas fasilitator kabupaten adalah konsultan tingkat provinsi dan, atasnya lagi, konsultan tingkat nasional.

Sedangkan dalam struktur pemerintahan, setiap tingkat—mulai dari desa hingga pusat—akan membentuk satuan kerja yang mengurus PNPM. Secara keseluruhan, kendali PNPM di bawah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden.

Jawahir menjadi fasilitator sejak 2009. Semula sarjana Teknologi Industri dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar ini bekerja sebagai dosen tidak tetap di bekas kampusnya. Saat mendengar ada lowongan sebagai fasilitator, ia langsung mendaftar dan menyisihkan puluhan calon lain.

Dalam penempatannya, Jawahir dikirim ke Kecamatan Tolinggula di Gorontalo Utara. Ini sebuah kecamatan pemekaran, masih baru, dengan desa hanya 11 buah. "Empat desanya berada di gunung," kata Jawahir. Kecamatan itu cukup terpencil. Jalan juga belum diaspal.

Sebagai fasilitator, mereka memang ikut dalam musyawarah mulai dari tingkat dusun. Setiap dusun akan menentukan tiga proyek yang akan diusulkan. Usulan itu mesti terdiri dari dua proyek fisik dan satu simpan pinjam kelompok perempuan. Mereka juga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan. Usulan itu kemudian akan "diadu" dengan dusun lain

Biasanya cuma ada orang datang, bilang akan ada proyek, tapi sesudah orangnya pergi tidak ada kelanjutannya.



di tingkat desa. Setelah lolos, usulan dibawa ke tingkat kecamatan.

Dipedalaman Gorontalo, Jawahir beruntung karena warga antusias dalam rapat-rapatnya. Mungkin karena desa yang ia fasilitasi masih terpencil dan infrastruktur dasar masih sangat kurang. "Rata-rata kalau rapat, balai desa tidak cukup," kata Jawahir. "Yang ikut ratusan."

Di salah satu lokasi, ada kepala desa yang rajin ikut dalam setiap rapat tingkat dusun. Setelah proposal dipastikan dan dana siap dikucurkan, kepala desa itu matanya berkaca-kaca dan mengaku kepada Jawahir bahwa ia ikut rapat karena semula tidak percaya dengan proyek ini. "Biasanya cuma ada orang datang, bilang akan ada proyek, tapi sesudah

orangnya pergi tidak ada kelanjutannya," kata Jawahir mengulang ucapan kepala desa yang terharu itu.

Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat desa itu kemudian mesti berembug dengan wakil-wakil dari desa lain untuk memilih Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan. Mereka juga memilih satu orang yang mereka percaya sebagai pengawas.

Kadang rapat di tingkat ini bisa menjadi malapetaka bagi fasilitatornya. Muh Jalaluddin, fasilitator di Kecamatan Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat, misalnya. Saat memfasilitasi pemilihan pengurus Tim Pengelola Kegiatan, rapat berjalan buruk.

Sebagian minta pengurus lama bisa dipilih kembali, lainnya ngotot agar kepengurusan diganti semua. Jalaluddin, yang mencoba mengikuti peraturan, rupanya dianggap membela salah satu kubu. Akibatnya, ia dikejar pendukung kubu yang tidak puas. Ia terpaksa meminta bantuan polisi karena kemudian ada pihak yang siap bersenjata parang dan tombak.

Meski begitu, yang membuatnya sedih bukan soal keselamatan ini. Tapi ia lebih sedih jika masyarakat tidak menampakkan reaksi. "Kadang ada perasaan jenuh menghadapi masyarakat yang apatis dengan hadirnya program," ujarnya dalam salah satu tulisan.

Usulan proyek itu kemudian dibawa ke tingkat kabupaten untuk memproses pengucuran dana. Untuk pencairan dana,



tingkat kecamatan mesti membuat rekening bersama yang hanya bisa diambil jika ada tandatangan empat orang, yakni dua fasilitator ditambah kepala Unit Pengelola Kegiatan dan satu pengawas.

Rekening pencairan dana itu mesti di bank-bank yang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah, seperti BRI atau BNI. Rekening itu akan mendapat pencairan dana secara bertahap, yakni 40 persen, 40 persen, dan 20 persen, untuk setiap proyek.

Dana dikirim dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sumber dana PNPM, baik dari APBN maupun dari bantuan seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB) memang dikirim ke



Meskipun pengawasan pencairannya sudah cukup ketat, ternyata masih ada saja kebocoran yang terjadi.

KPPN terlebih dahulu.

Meskipun pengawasan pencairannya sudah cukup ketat, ternyata masih ada saja kebocoran yang terjadi. Jawahir sempat dipindah ke kecamatan yang berdekatan. Di kecamatan yang ia fasilitasi, kegiatan berjalan lancar. Tapi di kecamatan sebelah, dananya diselewengkan. "Saya yang mengauditkeuangannya," katanya. "Kasusnya sekarang di (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau) Tipikor." 

RECKSAN SALUR, KPMD MATUTUANG:

BARU SAYA YANG HILANG LIMA HARI

19

“Kami hanya pasrah, berdoa memuji Tuhan. Saat itu hujan hanya rintik-rintik kecil, tertiup angin, Wadah pemapung air pun tak ada, sehingga kami tak bisa minum. Tapi akhirnya kami selamat. Ini berkat campur tangan Tuhan.”

NAHAS tiga tahun lalu itu masih lekat dalam ingatannya. Recksan Salur terapung di laut lepas lima hari lima malam, setelah perahu yang ia tumpangi bersama seorang rekannya, Karce Salensehe, terbalik digulung ombak dalam perjalanan dari pulau Matutuang menuju Marore di ujung utara Sulawesi.

Nyawa keduanya nyaris melayang. “Kami terseret arus hingga mendekati Tarakan,” ujarnya. Untuk memulihkan kulit-kulitnya yang mengelupas terbakar matahari, ia harus mondok dua pekan di rumah sakit.

Recksan adalah salah satu penggerak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

“Program ini bagus karena dampaknya langsung kepada masyarakat. Program dan dana yang dibutuhkan sesuai dengan usulan masyarakat.”



Perdesaan Mandiri. Terlahir di Filipina pada 13 Desember 1986, lelaki yang lebih fasih berbicara Tagalog, bahasa rakyat Filipina, ini ditunjuk menjadi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Pulau Matutuang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Meski medan yang dihadapinya di wilayah perbatasan Indonesia ini terbilang sulit, ia rajin menyosialisasikan program nasional pemberantasan kemiskinan ini. Tak jarang ia bahkan harus merogoh kocek sendiri untuk biaya transportasi antar pulau. "Saya bertanggung jawab pada masyarakat," tuturnya.

Apa saja tantangan yang dihadapinya, Reck-san berbicara singkat melalui telepon dengan Nur Farida Ahniar dari Katadata. Untuk melayani wawancara ini, ia rela menempuh perjalanan enam jam dengan kapal perintis ke ibu kota Sangihe, kota Tahuna.

BAGAIMANA AWALNYA MENJADI KADER DI PULAU MATUTUANG? PNPM masuk ke kampung Matutuang pada 2009. Awalnya saya tak tahu itu program apa. Aparat di Kecamatan Kepulauan Marore mengadakan rapat di kampung. Mereka melakukan sosialisasi apa itu PNPM. Dalam rapat itu dilakukan pemilihan siapa pelaku desa yang akan menjadi KPMD. Saya dan Karce Salensehe terpilih.

ADAKAH KESULITAN YANG DIHADAPI? Saya tidak memiliki pengalaman, terutama mengadakan pertemuan. Saya dilahirkan dengan



latar belakang Filipina (Meski berstatus WNI, 75 persen penduduk Matutuang berasal dari Filipina). Saya lebih menguasai bahasa Filipina. Bapak saya orang Sangihe, ibu saya campuran Filipina-Indonesia. Saya lahir dan mengenyam sekolah dasar di Filipina.

TAPI, BERHASIL ANDA LALUI? Di masa-masa awal menjadi KPMD cukup sulit. Namun, dengan keberanian, akhirnya saya mampu memimpin pertemuan-pertemuan di desa dan memfasilitasi masyarakat yang belum mengerti program tersebut. Datang ke rumah penduduk, ikut berkoordinasi ke Kecamatan Marore. Program ini bagus karena dampaknya langsung kepada masyarakat. Program dan dana yang dibutuhkan sesuai dengan usulan masyarakat.

“Menyiapkan dokumen sangat sulit. Karena kami tinggal di daerah ekstrem, tak ada alat komunikasi atau sinyal telpon.”

APA TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM MENJALANKAN TUGAS DI DAERAH KEPULAUAN YANG TERLETAK DI PERBATASAN? Menyiapkan dokumen sangat sulit. Karena kami tinggal di daerah ekstrem, tak ada alat komunikasi atau sinyal telpon. Dari segi jarak juga jauh, harus menggunakan kapal nelayan untuk menyerahkan dokumen ke

kecamatan. Pada 2009-2010 semangat saya masih menyala-nyala. Mengantar dokumen dengan biaya sendiri, karena saya tak tahu masalah dana operasional. Padahal, untuk pulang pergi saya harus membeli solar untuk perahu sebanyak 25 liter. Saya menganggap itu sebagai partisipasi. Saya bertanggung jawab demi masyarakat. Terlebih di Matutuang, kebanyakan warga di sana merupakan keluarga sendiri.

SEBAGAI KPMD BERAPA HONOR YANG ANDA TERIMA? Yang saya tahu, honorinya pada 2009-2010 hanya Rp100 ribu per bulan. Pada 2012 naik menjadi Rp 200 ribu. Tetapi tahun 2013 ini honorinya tidak cair sejak enam bulan lalu. Tahun ini saya belum menerima apa-apa. (Macetnya pembayaran gaji juga pernah dialami fasilitator PNPM di Indonesia).

BAGAIMANA SUKA DUKA MENJADI KPMD DI PULAU MATUTUANG? Transportasi dan komunikasi sangat sulit. Ketika harus ada sesuatu yang dikerjakan dari kecamatan, kami cuma dikirim nota yang dititipkan perahu nelayan. Kami harus menghadapi masyarakat dengan pendidikan yang rendah, perlunya adaptasi bahasa, dan pindahan dari Filipina menjadi tantangan tersendiri. Kami sangat memerlukan jaringan komunikasi untuk mengurangi risiko. Sebab, mayoritas penduduk Matutuang merupakan nelayan. Jadi, jika terjadi apa-apa bisa cepat diketahui. Alat transportasi juga sangat diperlukan karena kapal perintis

“Dulu ketika belum ada kapal perintis, ketika nelayan tak bisa melaut, kami hanya bisa makan kelapa muda.”

datangnya dua minggu sekali. Jadwalnya juga tidak pasti, tergantung dari kabupaten.

PROGRAM APA SAJA YANG DIKERJAKAN DI MATUTUANG MELALUI PNPM? Selama PNPM hadir 2009-2012, telah dibangun talud pantai sepanjang 420 meter. Dari pembangunan jalan dengan target 1.100 meter, yang sudah direalisasikan mencapai 980 meter. Program lainnya yaitu pengadaan mesin diesel dan instalasi listrik berkapasitas 22,5 KVA. Kami juga membangun 18 unit MCK, sumur bor tiga unit sekaligus, membuat 3 kamar mandi, beserta drainase sepanjang 417 meter.

BAGAIMANA KEHIDUPAN DI MATUTUANG? Kehidupan di daerah ini bisa dibilang susah, tetapi kami jalani saja. Dulu ketika belum ada kapal perintis, ketika nelayan tak bisa melaut, kami hanya bisa makan kelapa muda. Adanya kapal perintis sangat membantu membeli bahan makanan dan barang-barang lain. Di sana tak ada buah-buahan. Hanya kelapa saja, karena kontur tanah tak subur.

APA BEDANYA TINGGAL DI FILIPINA DIBANDING DI PULAU MATUTUANG, SANGIHE? Sangat jauh berbeda. Untuk masalah lapangan kerja, di Matutuang lebih banyak. Penduduknya sedikit, sehingga masih bisa menjadi nelayan. Berbeda halnya dengan di Filipina. Di sana harus bekerja sekuat tenaga, tak ada subsidi, dan harus bekerja sendiri.

“Kalau nelayan hilang sudah biasa. Tetapi biasanya dua hari sudah ditemukan. Baru saya yang hilang hingga lima hari.”

Saya ke Indonesia ketika hendak mendaftar SMP tahun 2000 di Tahuna, ibukota kabupaten Sangihe. Karena tak mengerti bahasa Sangihe, saya berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang mudah. Sayangnya ketika hendak ujian kelulusan, ijazah SD saya tak diterima dengan alasan format yang berbeda. Padahal, saya sudah tiga tahun mengenyam pendidikan SMP di Tahuna. Saya tak boleh ikut ujian, dan tak bisa melanjutkan jenjang pendidikan SMA.



KETIKA ANDA TERAPUNG-APUNG DI LAUT, APAKAH WARGA MENYADARINYA?

Warga baru mengetahui kami hilang satu hari kemudian. Ketika itu ada pemberitahuan dari Kecamatan

Marore bahwa rakor

ditunda menjadi Senin karena cuaca buruk. Padahal, saya sudah berangkat hari Sabtu. Dari situ warga panik. Minggu sore masyarakat baru mencari (saya dan Karce), termasuk orang tua saya dan suami Karce.

KABARNYA NELAYAN HILANG MERUPAKAN SESUATU YANG UMUM?

Kalau nelayan hilang sudah biasa. Tetapi biasanya dua hari sudah ditemukan. Baru saya yang hilang hingga lima hari. **D**



**JEREMIA P. ANTARA, PENDAMPING
LOKAL PNPM TABUKAN TENGAH :**

JARAK ANTARDESA SANGAT JAUH

PENGHARGAAN yang diterimanya dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjadi bukti dedikasi Jeremia P. Antara selama bertahun-tahun. Ia terpilih menjadi pendamping lokal terbaik nasional untuk kategori lokasi ekstrem dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 2013.

Kariernya dimulai pada 2007 ketika ia diangkat sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang merupakan tempat kelahirannya 30 tahun silam. Daerahnya yang berbukit-bukit dengan banyak pulau di sekelilingnya membuat kabupaten ini dikategorikan sebagai lokasi ekstrem.

Hanya berselang setahun, Jeremia dipromosikan menjadi pendamping lolak Kecamatan Tabukan Tengah. Sebagai pendamping lokal, ia membantu fasilitator kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestarian program kerja.

Terkadang ia harus memimpin rapat desa dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. “Sesuatu yang baru karena dulu saya tak bisa berbicara di depan umum,” ujar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Tahuna Jurusan bangunan ini kepada Nur Farida Ahniar dari Katadata di kantor sekretariat PNPM Kecamatan Tabukan Tengah, Kepulauan Sangihe, Juni lalu.

“Dulu akses jalan menuju Sekolah Dasar di Desa Bowongkali masih jalan tanah sehingga jika hujan kondisinya sangat becek.”

BAGAIMANA AWAL MULA ANDA MENJADI PENDAMPING LOKAL? PNPM masuk ke Kecamatan Tabukan Tengah, Sangihe, pada 2007. Dalam musyawarah desa saya terpilih menjadi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Bowongkali. Setahun kemudian, saya diangkat sebagai pendamping lokal yang bertugas membantu fasilitator. Saat itu saya memang belum memiliki pekerjaan. Saya merasa tertarik menjadi pendamping lokal setelah mengenal PNPM. Menurut saya program ini berbeda dengan program pemberdayaan yang lain karena semua usulan berasal dari masyarakat.

BAGAIMANA AWAL-AWAL KEGIATAN PNPM SAAT ITU? Awalnya dari penggalian gagasan. Kampung saya sendiri terdiri dari empat dusun yang jaraknya berjauhan. Ada dusun yang bahkan harus dijangkau dengan kapal. Saya harus mendekati masyarakat menjelaskan apa itu PNPM dan menjaring usulan. Masyarakat sangat antusias menyampaikan gagasannya karena PNPM memiliki sistem yang lebih baik.

“Dulu akses jalan menuju Sekolah Dasar di Desa Bowongkali masih jalan tanah sehingga jika hujan kondisinya sangat becek.”

PROGRAM APA YANG DIUSULKAN MASYARAKAT? Pembuatan jalan menuju sarana pendidikan. Dulu akses jalan menuju Sekolah Dasar di Desa Bowongkali masih jalan tanah sehingga jika hujan kondisinya sangat becek. Panjang jalan yang dibangun sekitar 700 meter dari sekolah menuju pemukiman warga.



**BERAPA LAMA PROSES
PEMBANGUNANNYA? Dari perencanaan
hingga dana cair memakan waktu empat
bulan. Ketika membangun, masyarakat sangat
antusias. Apalagi dengan pengelolaan dana
yang transparan. Selain menggunakan dana
PNPM, warga secara swadaya menyumbang
tenaga dan 25 kubik batu. Masyarakat yang
dulunya pengangguran dilibatkan sebagai
tukang sehingga mendapat penghasilan. Proses
pengerjaannya memakan waktu dua bulan.**

APA SAJA SARANA FISIK YANG

DIBANGUN MELALUI PNPM? Bangunan pengolahan sagu, talud pantai, talud sungai, jembatan, jalan desa, sarana air bersih, drainase, dan tambatan perahu. Kecamatan Tabukan Tengah merupakan daerah pertama di Sangihe yang memiliki bangunan pengolahan sagu. Hingga sekarang tak ada kecamatan lain di Sangihe memiliki alat serupa.



APA LATAR BELAKANG PEMBUATAN SARANA PENGOLAHAN SAGU? Di bidang pertanian, mengolah sagu merupakan sumber mata pencaharian masyarakat selain mengandalkancengkih dan kelapa. Dulunya sagu diolah dengan alat tradisional

seperti cangkul. Bangunan pengolahan sagu itu diusulkan masyarakat pada 2009. Bangunannya terdiri dari penampung air bersih, mesin pencacah sagu, pembersih sagu dan penampung endapan sagu. Mesin pencacah sagu kami rakit sendiri dari mesin perahu. Dengan mesin itu, mencacah sagu yang semula dikerjakan dalam waktu dua hari, kini hanya tinggal dalam hitungan menit. Saat ini telah berdiri



“Saat ini telah berdiri 12 bangunan pengolahan sagu di empat desa Kecamatan Tabukan Tengah.”

12 bangunan pengolahan sagu di empat desa Kecamatan Tabukan Tengah. Bangunan itu kini menjadi aset desa. Untuk biaya pemeliharaan, masyarakat membayar iuran yang diatur dalam peraturan desa.

**APA PENGALAMAN YANG MEMBEKAS
KETIKA MENJADI PENDAMPING LOKAL?**

Harus menghadapi berbagai unsur masyarakat dengan segala karakteristiknya dan memberikan presentasi di depan masyarakat desa. Ada perasaan demam panggung juga awalnya, terutama menghadapi tokoh masyarakat yang lebih tua dan pandai.

**BERAPA INSENTIF YANG DITERIMA
KETIKA MENJADI PENDAMPING LOKAL?**

Awalnya pendamping lokal menerima insentif Rp250 ribu setiap bulannya. Setiap hari saya menempuh perjalanan 9 km dari desa ke sekretariat kecamatan. Jarak antardesa sangat jauh, terkadang harus berlayar untuk menjangkau desa yang tak bisa dilalui dengan jalan darat. Sekarang ini insentif sudah dinaikkan menjadi Rp1 juta mulai 2012.

**PROGRAM APA YANG SANGAT
MENYENTUH MASYARAKAT? Menurut**

saya program simpan-pinjam perempuan. Dana simpan-pinjam ini digunakan untuk menambah modal usaha sehingga benar-benar menyentuh langsung. Yang dulunya tidak punya modal untuk berdagang ikan, malah kini ada yang



“Setiap hari saya menempuh perjalanan 9 km dari desa ke sekretariat kecamatan. Jarak antardesa sangat jauh, terkadang harus berlayar.”

punya perahu. Yang dulunya hanya menjadi penjahit kini memiliki toko baju kecil-kecilan. Dana simpan pinjam atau yang disebut kegiatan non-fisik ini dialokasikan dari 15 persen total dana yang disalurkan PNPM. Kredit ini diberikan ke setiap kelompok (minimal anggota 7 orang) yang membuat proposal peminjaman. Di Tabukan Tengah sendiri terdapat 50 kelompok simpan-pinjam perempuan. Pinjaman tanpa agunan ini hanya menyerahkan KTP sebagai jaminan. Bunganya 1,5 persen dalam waktu setahun. Tingkat pengembaliannya 95 persen dan jika menunggak KTP-nya akan dipajang di papan informasi desa.

APAKAH PERNAH TERJADI PENOLAKAN WARGA? Ketika mau membangun pengolahan sagu, ada sebagian masyarakat yang menolak fasilitas tersebut. Mereka ragu bagaimana memanfaatkan peralatan dan pemeliharannya. Akhirnya setelah dilakukan sosialisasi mereka mengerti. Sehingga ketika masa pembangunan tidak ada lagi penolakan.

BERAPA ALOKASI DANA PNPM UNTUK KECAMATAN TABUKAN TENGAH? Pada 2007 dana kegiatan PNPM sebesar Rp 1 miliar. Setahun kemudian meningkat menjadi Rp 2 miliar. Namun, pada 2009 turun kembali menjadi Rp 900 juta. Sedangkan pada 2010-2012 kecamatan ini mendapat dana lebih besar yaitu Rp 4 miliar. Namun, tahun ini kembali menurun menjadi Rp 900 juta. **D**

“Yang dulunya tidak punya modal untuk berdagang ikan, malah kini ada yang punya perahu.”



MENTERI DALAM NEGERI, GAMAWAN FAUZI:

JANGAN LAGI MODEL PROYEK

PENGALAMANNYA yang panjang sebagai Bupati Solok (1995-2005) dan Gubernur Sumatera Barat (2005-2009) membuat Gamawan Fauzi tahu persis apa model pembangunan yang tepat untuk bisa melibatkan warga masyarakat. Salah satu yang selalu dikritiknya adalah pembangunan yang berbasiskan model proyek.

Sebuah pengalaman menarik pernah dialami dirinya saat masih berkiprah membangun daerah, sebelum ia didapuk menjadi Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dikisahkannya ketika pada suatu hari ia berkunjung ke sebuah pasar.

Di tengah-tengah pasar itu, didapatinya sebuah selokan yang sudah dua hari airnya melimpah ke jalan. Rupanya selokan itu dalam kondisi mampet. Tanpa pikir panjang, ia meminta sopirnya menghentikan kendaraan yang ditumpanginya.

“Saya turun ke situ. Saya tusuk dengan galah. Tidak sampai setengah jam, pekerjaan yang saya lakukan bersama sopir dan ajudan itu rampung,” ujarnya ketika menerima tim Katadata dalam sebuah wawancara khusus di kantornya di Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. “Masyarakat tidak malu, padahal (selokan itu) di halaman tokonya. Kita kehilangan rasa memiliki.”

Menurut peraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award ini, sikap tak acuh itu disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang sejak awal Orde Baru kerap terperangkap model proyek dalam membangun sesuatu. Selalu dipikirkannya bahwa proyek itu adalah kepunyaan pemerintah.

Itu sebabnya, jika rusak diserahkan sepenuhnya ke pemerintah untuk memperbaikinya. Pemeliharaannya pun dipasrahkan ke pemerintah. Berkaca dari pengalaman itu, ia mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di bawah koordinasinya, yang mendorong inisiatif warga.

BAGAIMANA ANDA MELIHAT PNPM

SELAMA INI? Banyak program pembangunan turun dari “atas”, tapi kemudian tidak bermanfaat. Ini karena masyarakat tidak merasa memiliki. Sense of belonging masyarakat rendah. Berbeda dengan proyek yang dikerjakan masyarakat sendiri. Mereka akan rawat. Hasilnya akan lebih maksimal. Ini kekuatan PNPM.

CONTOHNYA? Ketika saya menjabat Bupati Solok, Provinsi Sumatera Barat, daerah saya menjadi pilot project PNPM. Kami bangun infrastruktur air bersih. Masyarakat merasa ini kebutuhan mereka, akibatnya tingkat partisipasi tinggi. Lahan pekarangan mereka dipakai untuk jalur air. Pipa dan bak-bak penampungan juga dibangun. Semua itu tidak pernah ada yang dibayar. Tapi, ketika semua itu menjadi proyek pemerintah semata, semua meminta ganti rugi, sekecil apa pun. Saya pernah membangun micro-hydro tidak melalui PNPM. Program itu hanya bisa bertahan dua tahun. Seharusnya mereka kelola sendiri. Tapi, tidak mau, karena dianggap proyek pemerintah. Pembangunan seolah-olah



“Program ini bagus karena dampaknya langsung kepada masyarakat. Program dan dana yang dibutuhkan sesuai dengan usulan masyarakat.”



menjadi kepentingan pemerintah saja.

BAGAIMANA POLA YANG IDEAL?

Jika semua proyek pembangunan diurus pemerintah, akan habis semua. Kerap terjadi rakyat dan pemerintah berada di dua kutub yang berhadap-hadapan. Padahal, semestinya merupakan partner. Pihak pemerintah membantu membiayai, tapi masyarakatlah yang berpartisipasi dengan merencanakan dan

meninjau kebutuhan mereka sendiri. Itulah inti PNPM. Pemerintah tidak perlu intervensi apa kebutuhan mereka. Pendamping pun hanya memfasilitasi. Jadi, di desa seyogyanya pembangunan dilakukan dengan model seperti ini, kecuali yang berskala besar dan rakyat tidak mampu mengerjakan.

APA KEUNTUNGANNYA DENGAN POLA SEPERTI INI? Keuntungannya, pemborong (pengerjaan proyek) hilang. Biaya administrasi tender pun tidak perlu, dan rasa memiliki tumbuh. Karena masyarakat berkeringat, maka proyek yang dibangunnya pun akan dijaga.

BAGAIMANA AGAR PROYEK PNPM BISA SELARAS DENGAN PROYEK PEMBANGUNAN LAINNYA? Dalam rencana yang disusun mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes), semestinya pembangunan tidak berdiri sendiri. Ada pembangunan yang masuk PNPM, tapi ada juga program yang masuk ke dalam program desa. Sejak dalam perencanaan sudah harus dipadukan dan diharmoniskan dari desa sampai kabupaten. Jadi, apa yang dibangun PNPM didampingi oleh program-program lain.

BISA DIBERIKAN CONTOH KONKRETNYA? Misalnya, jika PNPM membangun jalan, Pemerintah Daerah kabupaten membangun jembatan sehingga ruas itu bisa langsung dimanfaatkan. Lalu, jika PNPM menyediakan



“Keuntungannya, pemborong (pengerjaan proyek) hilang. Biaya administrasi tender pun tidak perlu, dan rasa memiliki tumbuh.”

irigasi sekunder, Pemda membangun irigasi tersiernya, sehingga air langsung masuk ke sawah. Saya mengajak seluruh kepala daerah, gubernur, dan bupati di sana untuk melihat PNPM secara utuh dan melakukan pendampingan terhadap program ini.

MEMATAHKAN KEBIASAAN MODEL PROYEK DALAM PEMBANGUNAN TENTU TAK MUDAH... Program PNPM memang tidak seksi, karena tidak ada tender dan tidak ada keuntungan kontraktor. Padahal, pikiran dan tradisi itu telah berjalan puluhan tahun. Saya kerap menjumpai sejumlah keluhan. Satu-dua daerah merasa tidak mendapatkan apa-apa. Tapi, saatnya kita hindari itu dan kita hentikan pikiran model itu.

SELALU ADA ANGGAPAN BAHWA PNPM ADALAH PROGRAM BANTUAN ASING... Awalnya memang dulu dibantu Bank Dunia sebagai pilot project. Bank Dunia bukan sekadar meminjamkan uang, tapi ide PNPM pun merupakan ide kita bersama. Jangan dianggap ini produk asing. Justru, menurut saya, ini pembangunanyangsesungguhnya. Pembangunan yang dirancang berdasarkan kebutuhan rakyat, diusulkan oleh rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan dinikmati oleh rakyat.

“Program PNPM memang tidak seksi, karena tidak ada tender dan tidak ada keuntungan kontraktor.”

MASIH KERAP TERJADI, USULAN SESUNGGUHNYA DITENTUKAN OLEH ELITE DESA? Ketika merumuskan sebuah

kebijakan, kadang ada saja bias-bias pengaruh ketokohan dan pengaruh politik di desa. Forum dikuasai oleh tokoh-tokoh berpengaruh, yang tidak tertutup kemungkinan membawa kepentingan mereka juga. Jadi, seolah-olah untuk masyarakat, tapi ternyata untuk kepentingan tokoh lokal. Karena itu, yang terpenting bagaimana mengurangi bias tersebut.

KRITIK ANDA TERHADAP PELAKSANAAN PNPM SELAMA INI? Karena persyaratan dari World Bank, kita banyak memakai konsultan. Konsultan itu ditender, tapi harus yang berpengalaman. Akhirnya yang menang itu-itu juga. Biaya untuk itu pun mahal sekali. Itu membuat kita tidak maksimal. Staf kami sedikit yang terpakai. Ini tidak memberdayakan. Semestinya dilepas pelan-pelan dari konsultan kepada kami. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa seharusnya sudah bisa menangani. Lima belas tahun belajar masak tidak bisa.

KRITIK LAIN, YAITU TIDAK ADA ANALISIS DAMPAK YANG MEMADAI TERHADAP PROGRAM INI? PNPM sudah berjalan 15 tahun. Sudah saatnya kita tidak hanya melihat output dan outcome. Kita harus sudah menghitung impact. Dari 15 tahun yang kita bangun itu, impact-nya apa ke masyarakat. Bukan hanya yang dilihat secara kasat mata. Misalnya, kita membangun jalan. Jalan itu manfaatnya besar atau kecil atau mungkin ada

jalan lain yang lebih bermanfaat.

**WAKIL PRESIDEN BOEDIONO
MEMANDANG JENIS PNPM LEBIH BAIK
DISEDERHANAKAN. MENURUT ANDA?**

Saya bilang dua saja, kembali ke dasarnya, yaitu PNPM perdesaan dan perkotaan. Jangan dibuat banyak-banyak, nanti tidak terkontrol dan biasanya besar.

PNPM AKAN BERAKHIR DI 2014...

Pembangunan dengan PNPM bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus menghemat biaya. Karena itu, saya berharap program ini tidak berhenti. Program-program semacam PNPM akan menjadi ikon, model pembangunan ke depan. PNPM betul-betul dirancang sebagai pembangunan yang murni bottom up. Saya akan mendorong ini sampai menjadi kekuatan pembangunan yang bisa menggeser model-model proyek. Kalaupun suatu saat program ini berhenti, spiritnya tidak boleh hilang.



“Saya akan mendorong ini sampai menjadi kekuatan pembangunan yang bisa menggeser model-model proyek.”

ADA ANGGAPAN PNPM ADALAH PROGRAM REZIM PEMERINTAHAN SAAT INI... Program ini kan sejak 1997. Program ini sudah lintas presiden, lintas partai politik. Sekali-kali kita perlu untuk tidak selalu membawa pikiran kita ke dunia politik. Kita harus melihat sebagai sebuah gagasan yang baik, yang harus dipandang secara jernih. Jika kita selalu melihat dari kaca mata politik, akan menjadi tidak sehat. **D**

